

**EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT DI KELURAHAN SAIL KECAMATAN TENAYAN
RAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2013**

M. SYUKRIADI

Email: syukriadi@yahoo.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam Jl. Hr. Soebranas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
28293- telp/fax 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine the evaluation of public policy while direct assistance in the Village District of Tenayan Raya Sail Pekanbaru City in 2013. This research was conducted in the village Sail District of Tenayan Raya Pekanbaru City Sail Year 2013 Sub District of Pekanbaru City Tenayan Raya in 2013 are being used as research for the reason that, the village Sail District of Tenayan Raya Pekanbaru City in 2013 is getting BLSM most areas. This is a descriptive study, the data analysis techniques used are imaging techniques with words or sentences and are split by category to obtain the data and conclusions obtain accurate conclusions in this research. The survey results revealed that after the evaluation, implementation Sail BLSM in the Village District of the city of Pekanbaru Tenayan Raya Year 2013 was good, but not maximized. The conclusion is: The implementation of the program BLSM in the Village Sail goes well, smoothly and orderly. Phase of the program BLSM in the Village Sail starts from socialization, implementation of data verification RTS nomination rosters, dealing BLT, BLT disbursements, and final implementation report generation. Socialization has been implemented properly to the district level, but only a few are following up with the socialization at the RT level. BLSM card division process runs smoothly and carried out door to door to RTS. Disbursement of funds in all districts BLSM running smoothly, orderly and safe, but still things happen as follows: (1) the long queues and crowded at the payment location, due to lack of payment counter, (2) RTS vulnerable (elderly, sick, and disability) mixed together, because there is no special counters for them, (3) RTS does not come as scheduled, due to lack of socialization.

Keywords: Evaluation of Public Policy, BLSM

PENDAHULUAN

Menurut Riant Nugroho (2012:30) kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua

Negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik adalah domain dari

Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk mememanajemeni kehidupan bersama yang disebut sebagai Negara dan bangsa.

Analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan tidak dimaksudkan menggantikan politik, dan membangun elite teknokratis.

Pelaksanaan kebijakan publik terdiri dari berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan distributive. Kebijakan distributif resmi misalnya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dari daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya. Kebijakan distributif, biasanya merupakan koleksi kebijakan distributif sebelumnya yang menciptakan bias kebijakan, seperti kebijakan kenaikan BBM yang diimbangi dengan kebijakan redistributif subsidi BBM dan Bantuan langsung sementara masyarakat (BLT).

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dalam 2 tahun terakhir,

pengurangan subsidi BBM terus dilakukan. Pengurangan subsidi BBM dikurangi dan diganti atau dialihkan dalam bentuk Bantuan langsung sementara masyarakat (BLT). Program BLSM dinilai sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementerian/lembaga terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung kepada pemerintah daerah/ oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program BLT.

Tujuan program BLSM tahun 2008 bagi RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, adalah: (1) membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Pada hakikatnya Program Bantuan langsung sementara masyarakat merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan langsung sementara masyarakat masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin

(Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Program BLSM dilaksanakan berdasarkan Inpres no 3 tahun 2008 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program BLT, penanggung jawab penyaluran dana BLSM adalah Depsos yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. Melalui kemensos no 28/HUK/2013, menteri sosial menunjuk PT Pos Indonesia dan BRI sebagai pelaksana penyaluran dana BLSM 2013 kepada RTS.

BLSM juga dibagikan di wilayah Pekanbaru. Warga Pekanbaru yang menerima Bantuan langsung sementara masyarakat (BLT) dari pemerintah pusat mencapai 17.378 Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan data tanggal 24 April, dari 17.329 penerima BLSM tahap I, BPS membatalkan 4.197 KKB. Jumlah penerima BLSM yang berhak hanya 13.132 RTM setelah dicoklit. Namun yang sudah disalurkan baru 13.010 RTM, karena 122 RTM masih menunggu kartu mereka dicetak ulang. Program BLSM juga mencapai Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Provinsi Riau. Untuk mengetahui penetapan Pagu alokasi BLSM per Kecamatan di Kota Pekanbaru dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

Penetapan Pagu Alokasi BLSM Per Kecamatan Kota Pekanbaru Bulan Januari sampai Desember Tahun 2013

No	Kecamatan	KK
1.	Sukajadi	127
2.	Pekanbaru Kota	74
3.	Sail	45

4.	Limapuluh	87
5.	Rumbai	265
6.	Senapelan	145
7.	Bukit Raya	152
8.	Tampan	277
9.	Marpoyan Damai	257
10.	Tenayan Raya	420
11.	Payung Sekaki	194
12.	Rumbai Pesisir	221
	Total	17.378

Sumber: Surat Edaran Walikota, 2013

Data yang didapatkan menyebutkan bahwa Penetapan Alokasi BLSM Per Kecamatan Kota Pekanbaru Bulan Januari sampai Desember Tahun 2013 dibagikan terhadap 12 Kecamatan yang ada di Kotamadya Pekanbaru antara lain adalah kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail, Limapuluh, Rumbai, Senapelan, Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir. Salah satu Kecamatan yang mendapatkan jatah BLSM terbanyak adalah Kecamatan Tenayan Raya yaitu Rp. 631,200,000.00., sedangkan Kecamatan yang paling sedikit mendapatkan jatah BLSM adalah Kecamatan Sail yaitu Rp. 68,700,000.00.

Data yang diperoleh di atas didukung oleh hasil observasi penulis. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembagian yang tidak tepat sasaran.
2. Data dari BPS tidak akurat. Data yang diberikan BPS tidak sesuai dengan jumlah

- penerima yang seharusnya mendapatkan BLT.
3. Penerima BLSM bukan hanya masyarakat dari golongan yang tidak mampu, tetapi justru masyarakat yang mampu juga menerima.
 4. Terjadi keterlambatan pembagian. Menurut Kepala PT Pos Indonesia Pekanbaru, Tasman, menyatakan bahwa dana keseluruhan untuk 17.378 RTM penerima BLSM di Pekanbaru mencapai Rp5,2 miliar. Namun untuk pembagian BLSM pada hari ini untuk 218 RTM, menggunakan dana operasional PT Pos Indonesia Pekanbaru. "Sampai saat ini dana dari pusat belum turun. Jadi kita ambil dulu dana operasional kita," ujar Tasman. Total dana yang terpakai mencapai Rp. 65,4 juta
 5. Dalam pelaksanaannya, eksekusi daripada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya adalah banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai. Beberapa warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, seperti orang yang telah meninggal. Beberapa kalangan juga menilai BLSM ini tidak tepat, dan juga tidak merata.

Berdasarkan fenomena yang diperoleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang evaluasi pelaksanaan

pembagian BLSM yang kurang sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam sebuah penelitian dengan judul: "Evaluasi kebijakan Bantuan langsung sementara masyarakat di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tahun 2013".

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan penelitian ini adalah: "Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan Bantuan langsung sementara masyarakat di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tahun 2013".

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan Bantuan langsung sementara masyarakat di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tahun 2013

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dibangku perkuliahan sekaligus sebagai penerapan ilmu tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- b. Sebagai referensi bagi pihak yang memerlukan untuk dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis dan pihak yang membaca untuk menambah

wawasan terhadap ilmu pengetahuan.

Kerangka Teori

1. Evaluasi

Penilaian (*evaluation*) adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan kriteria tertentu. Hasil pengukuran merupakan angka mati yang tidak mempunyai makna apa pun. Pengambilan keputusan belum dapat dilakukan hanya atas dasar hasil pengukuran. Hasil pengukuran baru mempunyai makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan setelah dibandingkan dengan kriteria tertentu. Interpretasi terhadap hasil pengukuran hanya dapat bersifat evaluative apabila disandarkan pada suatu norma atau kriteria (Azwar dalam Purwanto, 2011:3).

2. Kebijakan

a. Pengertian

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Poerwadarminta, 2005:149). Menurut Dunn dalam Riant Nugroho (2012:299), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis

kebijakan adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan tidak dimaksudkan menggantikan politik, dan membangun elite teknokratis.

Konsep pembangunan pada mulanya, dan pada dasarnya diacukan kepada pengertian pembangunan ekonomi. Dari sudut ilmu ekonomi, pembangunan berarti suatu proses dimana pendapatan perkapita dari suatu negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang. Dari sudut ilmu sosial, pembangunan sering kali diartikan sangat umum, yaitu perubahan sosiokultural yang direncanakan. Secara garis besar pembangunan ini mengandung beberapa peringkat pengambilan keputusan, yaitu penentuan tujuan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan (Amri Marzali, 2007:56).

Penentuan kebijakan menurut Bintoro Tjokroamindjojo (1995:193) adalah menyusun suatu rangka kebijaksanaan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Pola kebijaksanaan ini menjadi landasan dan pengarah bagi program investasi dan merupakan suatu dukungan bagi pelaksanaan program.

1. Analisis Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda:

- a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
 - b. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Evaluasi dalam Analisis Kebijakan
- Sifat evaluasi:
- a. Fokus nilai
 - b. Interdependensi fakta nilai, pemantauan:prasyarat
 - c. Orientasi masa kini dan masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif
 - d. Dualitas nilai (tujuan cara)

3. Bantuan langsung sementara masyarakat (BLT)

a. Pengertian

Bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM (kadang disebut juga balsem) adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam 00.00.

Sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengadakan 2 bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu Bantuan langsung sementara masyarakat dan Bantuan Siswa Miskin. Pemerintah Indonesia meyakini tindakan ini adalah penting untuk menyelamatkan fiskal negara, meskipun pemerintah juga meyakini bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemerintah. Dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), telah

disepakati total dana ganti rugi kenaikan BBM bersubsidi sebesar 27,9 triliun rupiah.[2] Walaupun begitu, BLSM sering disebut masyarakat sebagai kelanjutan dari Bantuan langsung sementara masyarakat (BLT).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; yang kemudian di lanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/P.MK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; dengan pertimbangan bahwa dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah mengeluarkan kebijakan program pemberian Bantuan langsung sementara masyarakat kepada Rumah Tangga Sasaran; mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan langsung sementara masyarakat untuk Rumah Tangga Sasaran yang dananya bersumber dari dana rupiah murni yang dialokasikan dalam DIPA, perlu diatur petunjuk pelaksanaan; memutuskan untuk pencairan program dana BLSM tahap pertama yang dialokasikan dari APBN yang di peruntukan bagi katagori masyarakat rumah tangga masayarkat miskin, dengan anggaran masing rumah tangga mendapatkan anggaran sebesar Rp 100.000/bulan, dengan ketentuan penerimaan per tiga bulan sebesar RP. 300.000. dana tersebut di Alokasikan melalui perusahaan Pemerintah yang di bawah perusahaan presero PT. POS

Indonesia, di setiap Kecamatan Seindonesia.

Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 16 /Pb/2008 Petunjuk Pencairan Dana Program Bantuan langsung sementara masyarakat Untuk Rumah Tangga Sasaran Tahun Anggaran 2008, dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan langsung sementara masyarakat untuk Rumah Tanggan Sasaran; Maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Pencairan Dana Program Bantuan langsung sementara masyarakat Untuk Rumah Tangga Sasaran Tahun Anggaran 2008. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam pasal 1 bagian 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan Bantuan langsung sementara masyarakat untuk Rumah Tangga Sasaran, yang selanjutnya disebut BLT-RTS adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu kepada rumah tangga sasaran. Kemudian dalam pasal 2 bagian 1 memutuskan Dana Program BLT-RTS merupakan dana kompensasi terhadap pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang ditujukan untuk:

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Dengan ketentuan penetapan penerima dan yang diatur dalam pasal

4 bagian 3 Surat Keputusan Menteri Sosial tentang RTS penerima dana Program BLSM disampaikan kepada bank/pos mitra kerja. Dengan tata cara pencairan BLSM yang diatur dalam pasal 5 bagian Penyaluran dana Program BLT-RTS dilakukan melalui bank/pos mitra kerja berdasarkan suatu perjanjian kerjasama antara Kuasa PA dengan bank/pos mitra kerja.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Tesis Agus Parstyio Chriswardani Suryawati, 2010:18-19) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Program Bantuan Bantuan Lansung Tunai (BLT) merupakan dana yang dihasilkan dari subsidi/kompensasi BBM, melalui kenaikan BBM maka pemerintah memutuskan untuk memberikan BLSM melalui subsidi maka pemerintah memutuskan program bantuan terhadap masyarakat miskin di seluruh indonesia melalui APBN yang

berkerja sama dengan Bank/PT. Pos di seluruh Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia sendiri, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini mengalami penurunan. Pada periode Maret 2007 sampai Maret 2008 jumlah penduduk turun sebesar 2,21 juta, dari 37, 17 juta pada Maret 2007 menjadi 34,96 juta pada Maret 2008. Angka kemiskinan juga turun dari 16,58 persen menjadi 15,42 persen pada periode yang sama. Dari penurunan jumlah penduduk miskin ini sebagian besar terjadi di pedesaan, turun lebih cepat, sebesar 1,42 juta, dibanding penurunan penduduk miskin di perkotaan, sebesar 0,79 juta. Demikian itu menunjukkan adanya harapan bahwa strategi dan upaya untuk menanggulangi angka kemiskinan sekarang sudah berpa pada arah yang benar. Bahkan bila dibandingkan dengan jumlah dan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir, maka jumlah dan angka kemiskinan pada Maret 2008 tersebut merupakan angka terendah.

Tujuan dari program Bantuan langsung sementara masyarakat (BLT) tidak laun adalah untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat miskin sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang peneliti, (Wongdesmiwati dalam Tesis Agus Parsty 2010:24) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Maka pemerintah berupaya memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin melalui tunjangan setiap bulan yang di berikan tiga bulan sekali, supaya

dana yang di terima melalui kompensasi BBM bersubsidi dengan kisaran angka Rp. 300.000/orang.

Definisi Konsep

Sebelum membahas lebih lanjut tentang penelitian ini, maka untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menafsirkan istilah dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan-batasan konsep diantaranya :

1. Evaluasi adalah atau penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja
2. Pelaksanaan atau penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk tujuan perusahaan yang nyata.
3. Evaluasi pelaksanaan Bantuan langsung sementara masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada indikator kinerja yang meliputi Kelembagaan, Sosialisasi, Verifikasi, Ketepatan sasaran, pembagian KKB, pencairan dana, dan Pengaduan dan penyelesaian masalah

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2013. Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2013 dijadikan lokasi penelitian dengan alasan bahwa, kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru Tahun 2013 merupakan daerah yang mendapatkan BLSM terbanyak.

Informan peneliti adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan, proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan lainnya. Bermula dari penanggung jawab program di tingkat kotamadya, camat, kepala desa atau perangkat desa, ketua RT/RW, pejabat PT. Pos Indonesia, dan masyarakat. Berdasarkan petunjuk dari informan awal tersebut penulis mengembangkan penelitian ke informan lain, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses semacam ini dianalogikan sebagai proses menggelembungnya bola salju (*snow ball*).

Menurut Lexy J. Moloeng (2009:4) penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan Lexy tersebut. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kepada objek penelitian.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak

(Lexy, 2009). Dalam kegiatan wawancara ini peneliti mempersiapkan alat perekam suara berupa *tape recorder* dan kamera serta alat tulis berupa buku dan pena atau pensil untuk mencatat keterangan yang diberikan oleh informan.

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data administratif ataupun arsip dari kegiatan yang ditemui oleh peneliti di lapangan. Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan setiap informasi yang didapat dari informan sebagai bukti penelitian, berupa rekaman wawancara dan lain sebagainya.

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik/tabel, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus

melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dalam hal ini diartikan peneliti dengan pemikiran kembali (selintas) selama peneliti menulis atau meneliti, yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar-pikiran dengan teman sejawat untuk mendapatkan suatu temuan dalam seperangkat data yang telah didapatkan. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.

Pembahasan

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran BLSM yang dibuat oleh Departemen Sosial RI, dimana di tingkat kabupaten tahap-tahap Program Penyaluran BLSM dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, pembagian Kartu, pencairan dana, dan terakhir pelaporan kegiatan. Selanjutnya sosialisasi tidak berhenti hanya di tingkat kabupaten. Sosialisasi dilaksanakan sampai tingkat kecamatan dan desa. Sebagaimana disampaikan informan, kecamatan wajib mengadakan sosialisasi agar program BLSM dapat berjalan lancar.

Kegiatan pembagian BLSM adalah kegiatan nasional yang membutuhkan peranserta seluruh masyarakat. Disitulah peran serta masyarakat dijadikan alat evaluasi bagi pemerintah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pengertian evaluasi kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut

kehidupan publik. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Dunn, 2003).

Tujuan dari adanya evaluasi khususnya program BLSM tahun 2013 ini adalah: pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu (sebagai contoh, 20 persen pengurangan penyakit kronis pada tahun 1990) telah dicapai.

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan

kepentasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Pengertian evaluasi kebijakan publik di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan

publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (evaluating) adalah: "Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses evaluasi pelaksanaan pembagian BLSM dalam pelaksanaan program BLSM di Kelurahan Sail berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Akan tetapi ada beberapa permasalahan, salah satunya sosialisasi juga tidak melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu karang taruna, taruna siaga bencana, pekerja sosial masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Selain itu Kendala yang terjadi adalah : (1) kartu BLSM sudah diterima lurah sebelum verifikasi data, (2) adanya arahan dari Kantor Pos untuk tidak melaksanakan prosedur verifikasi, (3) dapat mengalihkan kartu BLSM kepada orang lain dengan membawa surat keterangan dari lurah, (4) menimbulkan konflik di masyarakat, karena adanya pencoretan

nama RTS yang dianggap sudah tidak miskin lagi.

Pencairan dana BLSM di semua kecamatan berjalan dengan lancar, tertib dan aman, namun masih terjadi hal-hal sebagai berikut : (1) antrian panjang dan berjubel di lokasi pembayaran, karena kurangnya loket pembayaran, (2) RTS yang rentan (sudah tua, sakit, dan cacat) berburu jadi satu, karena tidak ada loket khusus bagi mereka, (3) RTS datang tidak sesuai jadwal, karena kurangnya sosialisasi.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program BLSM kembali digulirkan pemerintah pada tahun 2013. Pemerintah melanjutkan skema program PKPS-BBM dengan memberikan BLSM tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS)

sebesar Rp 100.000,- per bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000,-/3 bulan (Juni – Agustus) dan Rp 400.000,-/4 bulan (September-Desember). Tujuan dari program BLSM bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah : (1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, (2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan (3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Penelitian ini membahas dua kelompok pengamatan, pertama pengamatan terhadap proses pelaksanaan (implementasi) program, dan yang kedua pengamatan terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa setelah dievaluasi, pelaksanaan BLSM di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2013 sudah baik, namun belum maksimal. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program BLSM di Kelurahan Sail berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Tahapan pelaksanaan program BLSM di Kelurahan Sail dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data daftar nama nominasi RTS, pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terakhir pembuatan laporan pelaksanaan.
2. Sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun hanya sedikit yang menindaklanjuti dengan

mengadakan sosialisasi di tingkat RT. Materi yang disampaikan kurang lengkap, terutama masalah verifikasi data nominasi RTS. Sosialisasi juga tidak melibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu karang taruna, taruna siaga bencana, pekerja sosial masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

3. Verifikasi data nominasi RTS tidak berjalan dengan semestinya. Kendala yang terjadi adalah : (1) kartu BLSM sudah diterima lurah sebelum verifikasi data, (2) adanya arahan dari Kantor Pos untuk tidak melaksanakan prosedur verifikasi, (3) dapat mengalihkan kartu BLSM kepada orang lain dengan membawa surat keterangan dari lurah, (4) menimbulkan konflik di masyarakat, karena adanya pencoretan nama RTS yang dianggap sudah tidak miskin lagi.
4. Proses pembagian kartu BLSM berjalan lancar dan dilaksanakan secara door to door kepada RTS, namun banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pembagian kartu, yaitu (1) tidak dilibatkannya ketua RT/RW oleh pemerintah lurah /kelurahan dalam pembagian kartu, karena bisa ditangani sendiri oleh perangkat lurah , (2) ketua RT/RW menolak membagi kartu karena tidak berani atau trauma dengan kejadian di masa lalu, dan (3) kartu tidak dibagikan oleh kepala lurah /kelurahan karena RTS pergi belum kembali, RTS sudah tidak miskin, dan alasan lainnya.
5. Pencairan dana BLSM di semua kecamatan berjalan dengan lancar,

tertib dan aman, namun masih terjadi hal-hal sebagai berikut : (1) antrian panjang dan berjubel di lokasi pembayaran, karena kurangnya loket pembayaran, (2) RTS yang rentan (sudah tua, sakit, dan cacat) berbaur jadi satu, karena tidak ada loket khusus bagi mereka, (3) RTS datang tidak sesuai jadwal, karena kurangnya sosialisasi.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan pelaksanaan program BLT, hal-hal yang perlu Penulis rekomendasikan yaitu:

1. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga dapat diterima masyarakat dengan jelas.
2. Proses verifikasi data harus dilaksanakan di semua lurah /kelurahan, karena tujuan verifikasi data adalah untuk memperbaiki database RTS. Data tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk BLT, tapi juga bisa digunakan untuk program intervensi kemiskinan lainnya.
3. Pembagian kartu BLSM harus mematuhi alur proses yang telah ditetapkan, yaitu melibatkan ketua RT/RW, karena masing-masing tahap proses telah disediakan biaya pelaksanaan.
4. Lokasi pencairan dana BLSM dibuat lebih banyak, terutama untuk mendukung daerah terpencil/terisolir, untuk meringankan beban biaya

transportasi masyarakat miskin, dan penambahan loket pembayaran, khususnya bagi RTS yang rentan (sudah tua, sakit, dan cacat).

5. Pembuatan laporan agar lebih diperjelas baik format laporan maupun batas waktu pelaporan. Demikian juga pengiriman laporan tidak hanya kepada atasan saja, melainkan juga memberi tembusan kepada instansi terkait yang terlibat dalam tim unit pelaksana program (UPP) dan tim koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Endar Sugiarto. 2002. *Evaluasi Kebijakan*. Bandung: Pioner jaya
- Pedoman Umum Penyaluran BLT. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidangkesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
- Riant Nugroho, 2012, *Kebijakan Publik*, Jakarta:
- Riduwan, 2007, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, Bandung, Alfabeta
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung Alfabeta
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti. 1996. *Tata Kerja dan Produktivitas kerja*. Bandung. Mandar Maju
- Sedarmayanti, dkk. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung:

- Mandar Maju
- Purwanto, 2011, *Evaluasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Simamora, 2004, *Gaya Kepemimpinan*, Armico, Bandung.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Umberto Sihombing. 2000. *Manajemen Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta. PD. Mahkota. Brantas (2009:55-5)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

